FIGUR HUKUM

BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)

SEBAGAI LEMBAGA EKONOMI KERAKYATAN

Buku ini mengkaji aspek hukum *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang diawali dengan uraian mengenai BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah. BMT juga merupakan salah satu model sistem ekonomi kerakyatan yang perkembangannya dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, namun secara yuridis, BMT didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. Status BMT ditentukan oleh jumlah aset yang dimiliki, maka BMT memiliki status hukum yang berbeda pula sesuai dengan tahapan jumlah aset tersebut, serta tunduk pada hukum yang beragam dan parsial sesuai dengan tahap status hukum. Untuk itu, dalam buku ini, Penulis akan menguraikan konsep hukum pengaturan lembaga BMT di masa yang akan datang.

Buku ini diharapkan memenuhi kebutuhan, baik akademisi maupun praktisi yang berminat mengkaji aspek hukum BMT, serta mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, dan mahasiswa program Pascasarjana Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis.

Dr. Erisa Ardika Prasada, S.H.,M.H., lahir di Palembang pada tanggal 12 Maret 1985. Pendidikan Sekolah Dasar ditempuh di SD YKPP IV Plaju. Dilanjutkan di SLTP YKPP I Plaju. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMUN 17 Palembang. Selanjutnya meneruskan pendidikan S1, S2, dan S3 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis

diangkat menjadi Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Ogan Komering Ilir (UNISKI) Kayuagung pada tahun 2007, juga menjadi tenaga pengajar luar biasa di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

FIGUR HUKUM BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) SEBAGAI LEMBAGA EKONOMI KERAKYATAN
ERISA ARDIKA PRASADA

————— Dr. Erisa Ardika Prasada, S.H.,M.H. —————

FIGUR HUKUM

BAITUL MAAL

WAT TAMWIL

(BMT)

SEBAGAI LEMBAGA EKONOMI KERAKYATAN

FIGUR HUKUM
BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)
SEBAGAI LEMBAGA EKONOMI
KERAKYATAN

Erisa Ardika Prasada

pena persada

PENERBIT CV. PENA PERSADA

FIGUR HUKUM
BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)
SEBAGAI LEMBAGA EKONOMI KERAKYATAN

Penulis:

Erisa Ardika Prasada

ISBN: 978-623-7699-46-0

Design Cover:

Retnani Nur Brilliant

Layout:

Nisa Falahia

Penerbit CV. Pena Persada

Redaksi:

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah

Email: penerbit.penapersada@gmail.com

Website: penapersada.com

Phone: (0281) 7771388

Anggota IKAPI

All right reserved

Cetakan Pertama: 2020

Hak cipta dilindungi oleh Undang Undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin
penerbit

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., dan shalawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul **“Figur Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan”**.

Penulisan ini pada intinya mengenai konsep hukum terhadap lembaga keuangan mikro syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang memiliki badan hukum beragam dan tunduk pada perundang-undangan yang parsial. BMT sebagai model sistem ekonomi kerakyatan ini dapat diupayakan dan diusahakan melalui pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Kontribusi usaha kecil dalam pembangunan ekonomi dapat menyerap lebih dari 88% tenaga kerja dan mampu menyumbang pada PDB sebesar 38,9%. Saat indeks kebebasan ekonomi Indonesia semakin meningkat (tampak semakin liberal), sistem ekonomi kerakyatan memperkuat struktur perekonomian nasional saat terjadi krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari peran usaha besar atau konglomerat.

BMT merupakan badan usaha syariah yang tidak memiliki badan hukum, hanya BMT yang memenuhi syarat tertentu yang dapat menjadi sebuah badan hukum tertentu, misalnya berbadan hukum koperasi. Jika BMT dengan badan hukum koperasi telah berkembang dan telah memenuhi syarat-syarat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), maka pihak manajemen dapat mengusulkan diri kepada pemerintah agar BMT dijadikan sebagai BPRS, dalam hal ini BMT mengubah dirinya dari lembaga keuangan bukan bank menjadi lembaga keuangan bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini diatur dalam Pasal 27 Undang-undang

Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM) diatur bahwa LKM wajib bertransformasi menjadi bank jika LKM melakukan kegiatan usaha melebihi satu wilayah kabupaten/kota tempat kedudukan LKM, atau LKM telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Status hukum BMT dalam lembaga keuangan di Indonesia didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap, maka BMT memiliki status hukum yang berbeda pula sesuai dengan tahapan tersebut. BMT ada yang telah berbadan hukum dan ada yang belum berbadan hukum. BMT yang berbadan hukum, pada umumnya menggunakan badan hukum perseroan terbatas, yayasan, atau koperasi, sedangkan BMT yang belum berbadan hukum disebabkan karena masih merupakan bagian dari Dewan Kemakmuran Masjid.

Demi kepastian hukum keberadaan BMT sebagai subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum, dipandang perlu dibentuk badan hukum perhimpunan BMT beserta perangkat hukumnya. Badan hukum perhimpunan BMT tersebut disesuaikan dengan karakteristik BMT yang meliputi manajemen keuangan *baitul maal* (pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah) dan *baitul tamwil* (pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi) sesuai dengan prinsip Islam.

Dengan telah selesainya penyusunan buku ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis Ir. Rasjdi Arasj (alm.) dan Yulia serta Yunani Usman dan Maimunah, SPd., yang senantiasa memberikan dorongan semangat dan doa untuk keberhasilan penulis.
2. Firmansyah, S.Pd.I., M.Pd.I., suami penulis dan anak kembar tercinta Syauqi dan Tamim atas semangat yang tiada pernah henti dan dukungan yang begitu besar selama proses penyelesaian buku ini.
3. Dr. Febrian, S.H.,M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas perhatian, arahan, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini.

4. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Promotor dan Dr. H.K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku Co-Promotor penulis tatkala penulis menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Dr. Hj. Azizah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Ogan Komering Ilir atas perhatian, arahan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini.
6. Dr. Umar Husein, Ketua PINBUK Sumatera Selatan, yang telah bersedia menjadi narasumber penulis.
7. Anjar Sumarjati, Pengawas Industri Keuangan Nonbank, Otoritas Jasa Keuangan Regional VII Sumatera Selatan, yang telah bersedia menjadi narasumber penulis.
8. Neliwati, S.H.,M.H., Fungsional Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, yang telah bersedia menjadi narasumber penulis.
9. Ir. Jonizar, M.T. Ketua BMT Surya Barokah, yang telah bersedia menjadi narasumber penulis. Kritik, masukan dan saran yang sangat berguna untuk menyempurnakan buku ini.
10. Penerbit CV. Pena Persada yang telah bersedia menerbitkan buku ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu atas tersusunnya buku ini, semoga dapat memberi manfaat sesuai dengan fungsinya. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi lengkapnya pembahasan buku ini.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Palembang, 31 Juli 2019

Erisa Ardika Prasada

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I	
PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN <i>BAITUL MAAL WAT TAMWIL</i> (BMT) DALAM NASIONALISME EKONOMI INDONESIA	1
A. Perekonomian Nasional dan Permasalahannya	1
B. Dimensi <i>Baitul Maal wat Tamwil</i>	15
BAB II	
<i>BAITUL MAAL WAT TAMWIL</i>	43
A. Sejarah <i>Baitul Maal wat Tamwil</i>	43
1. Sejarah <i>Baitul Maal</i>	43
2. Sejarah <i>Baitul Maal wat Tamwil</i>	48
a. Faktor Filosofis	51
b. Secara Sosiologis	51
c. Secara Yuridis	51
B. Profil <i>Baitul Maal wat Tamwil</i>	52
1. Tujuan <i>Baitul Maal wat Tamwil</i>	52
2. Sifat <i>Baitul Maal wat Tamwil</i>	52
3. Visi <i>Baitul Maal wat Tamwil</i>	52
4. Misi <i>Baitul Maal wat Tamwil</i>	53
5. Fungsi <i>Baitul Maal wat Tamwil</i>	53
6. Prinsip-prinsip Utama <i>Baitul Maal wat Tamwil</i>	53
7. Ciri-ciri Utama <i>Baitul Maal wat Tamwil</i>	54
C. Prosedur Pendirian <i>Baitul Maal wat Tamwil</i>	54
D. Struktur Organisasi <i>Baitul Maal wat Tamwil</i>	57
1. RAT (Rapat Anggota Tahunan)	58
2. Pengurus	59
3. Pengelola	61

4. Dewan Pengawas	65
E. Manajemen Operasional dan produk <i>Baitul Maal</i> <i>wat Tamwil</i>	65
1. Produk penghimpun Dana	68
a. <i>Wadi'ah</i>	69
b. Simpanan Berjangka (<i>Mudharabah</i>)	73
2. Produk Penyaluran Dana	77
a. Produk Jual Beli	78
b. Teknik Pelaksanaan Skema <i>Murabahah</i>)	79
c. Teknik Pelaksanaan <i>Piutang Salam</i>	81
d. <i>Bai' Al-Istishna'</i>	83
e. Produk Bagi Hasil	84
f. Produk Jasa	90

BAB III

STATUS HUKUM BAITUL MAAL WAT TAMWIL

DALAM LEMBAGA KEUANGAN DI INDONESIA

A. Kedudukan <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> dalam Lembaga Keuangan di Indonesia	95
1. Lembaga Keuangan Bank	96
2. Lembaga keuangan Bukan Bank	97
B. Status Hukum <i>Baitul Maal wat Tamwil</i>	103
1. BMT yang Belum Berbadan Hukum	103
2. BMT yang Memiliki Badan Hukum	108
a. Yayasan	108
b. Koperasi	108
c. Perseroan Terbatas	109

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS PENGUATAN HUKUM BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)

A. Landasan Filosofis	123
1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa	125
2. Sila kemanusiaan Yang Adil dan Beradab	129
3. Sila Persatuan Indonesia	130
4. Sila Kerakyatan yang dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan	

5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia ..	134
B. Asas-Asas Hukum yang Digunakan BMT	135
1. Asas-Asas BMT Sebagai Lembaga keuangan Syari'ah	137
2. Asas-Asas BMT Sebagai Lembaga keuangan	139
3. Asas-Asas BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	141
4. Asas-Asas BMT Sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan.....	143
5. Asas-Asas Hukum Penguatan BMT	144
C. Landasan Sosiologis	148
D. Landasan Yuridis	153

BAB V

KONSEP HUKUM LEMBAGA EKONOMI KERAKYATAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DI INDONESIA

A. Kerangka Teori	167
1. Teori Hukum Pembangunan	167
2. Teori Peran Institusi dan Fondasi	170
3. Teori Masyarakat dan Negara	173
4. Teori Penerimaan Otoritas Hukum	174
5. Teori Ekonomi Islam menurut Mahzab <i>Iqtishaduna</i>	175
6. Teori <i>Maslahah</i>	177
7. Teori Lingkaran Konsentris	179
8. Teori Badan Legislasi hukum	182
B. Implikasi Kajian atas BMT dan Konsep Hukumnya	187
1. Urgensi Implikasi Filosofis tentang Kesesuaian antara Konsep Bentuk Badan Hukum dan BMT.....	187
a. Asas Kesesuaian	189
b. Asas Kedinamisan.....	192
2. Dibentuknya Badan Hukum Perhimpunan BMT	195
a. Badan Hukum	195
b. Figur Hukum BMT dalam Lembaga Keuangan...	196
c. Dasar Hukum BMT sebagai Badan Hukum	199
d. Pemilihan Bentuk Badan Hukum.....	222
C. Dibentuknya Perundang-Undangan Khusus Pengelolaan BMT	223

BAB VI

SIMPULAN

A. BMT yang Belum Memiliki Badan Hukum 227

B. BMT yang Memiliki Badan Hukum 228

C. Dibentuknya Badan Hukum Perhimpunan BMT 229

D. Dibentuk Perundang-Undangan Khusus
 Pengelolaan BMT 230

DAFTAR PUSTAKA 235

DAFTAR TABEL

Tabel 1 PINBUK dan Pengalaman Pengembangan BMT di Indonesia	25
Tabel 2 <i>Financing of BMT Berkah Madani Cimanggis at Year 2007, 2008, and 2009</i>	31
Tabel 3 Klasifikasi Usaha Kecil, Menengah, dan Mikro	102
Tabel 4 BMT yang Memiliki Badan Hukum di Sumatera Selatan	117
Tabel 5 BMT yang Berproses Menjadi Badan Hukum di Sumatera Selatan	121
Tabel 6 Badan Hukum yang Digunakan BMT yang Menguraikan Hal-Hal yang Tidak Sesuai Dengan Karakteristik BMT	207

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Prosedur Pendirian <i>Baitul Maal wat Tamwil</i>	54
Bagan 2 Struktur Organisasi <i>Baitul Maal wat Tamwil</i>	57
Bagan 3 Alur Operasional <i>Baitul Maal wat Tamwil</i>	67
Bagan 4 Skema <i>Wadia'ah Yad Dhamanah</i>	71
Bagan 5 Skema <i>Wadia'ah Yad Amanah</i>	71
Bagan 6 Skema <i>Mudharabah</i>	75
Bagan 7 Skema <i>Murabahah</i>	81
Bagan 8 Skema <i>Ba'i As salam</i>	83
Bagan 9 Skema <i>Ba'i Al-Isthisna</i>	84
Bagan 10 Skema <i>Mudharabah</i>	87
Bagan 11 Skema <i>Musyarakah</i>	89
Bagan 12 Skema <i>Qardh</i>	93
Bagan 13 Skema <i>Al-Qardh-Al-Hasan</i>	93
Bagan 14 Skema Penyaluran Pembiayaan	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Piagam Gerakan BMT	50
Gambar 2	Jumlah BMT yang Berdiri Setiap Tahun Di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat	151
Gambar 3	Penyatuan Komponen Agama, Hukum, dan Negara yang Membentuk Lingkaran Konsentris.....	181

DAFTAR ISTILAH

Al-Qardh	: Pinjaman
Al-Qardhul al-hasan	: Pinjaman yang baik
Amil	: Pengurus zakat, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
An-Taradhin/ Al-Taradhi	: Asas kerelaan
Anfal	: Harta yang dikuasai oleh kaum muslimin melalui perang penaklukan
Bai' Al- Istishna'	: Akad jual beli dalam bentuk pembuatan barang
Bai' As-Salam	: Akad pemesanan suatu barang
Baitul Maal	: Rumah harta
Baitul Tamwil	: Pengembangan harta
Bona fides	: Itikad baik
Bottom up	: Berkembang dari inspirasi dan kebutuhan masyarakat
Dinasti	: Kekuasaan pemerintahan
Doktrin	: Ajaran atau pendapat para ahli
Egalitarianisme	: Faham yang menyatakan semua orang sama
Emiten	: Pencari dana, istilah dalam pasar modal
Fiqh Muamalat	: Pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum syariat
Foot loose	: Tidak mengakar pada rakyat
Ghanimah	: Harta rampasan perang
Gharim	: Orang yang berhutang
Gharar	: Ketidakjelasan
Hawalah	: Anjak piutang
Ibnu sabil	: orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan untuk

	bermaksiat dan mengalami kesengsaraan
Idarah	: Pengelolaan masjid
Ijarah	: Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri
Ijma	: Kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-quran dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi
Iktinaz	: Penimbunan
Inspiring	: Nilai tambah
Interpretasi	: Tafsiran
Investor	: Penanam modal
Jizyah	: Pajak per kapita yang diberikan oleh penduduk nonmuslim pada suatu negara di bawah peraturan Islam
Kafalah	: Jaminan
Kaffah	: Keterpaduan
Kharaj	: Cukai hasil tanah/tanah pertanian
Khums	: Pajak
Kooperasi	: Kerja sama
Legal persons	: Badan hukum
Legal standing	: Kedudukan Hukum
Linkage	: Hubungan atau keterkaitan
Maysir	: Perjudian
Monopoli	: Penjual tunggal
Monopsoni	: Pembeli tunggal
Muamalat	: Hukum syariat terhadap urusan ekonomi

Muallaf	: Orang yang baru masuk Islam dan Imannya masih lemah
Mudharat	: Tidak bermanfaat
Mudharabah	: Simpanan Berjangka
Mudharib	: Pengusaha
Muqassah	: Potongan margin
Murabahah	: Perjanjian jual beli antara bank dan nasabah
Mustauda'	: Pihak yang menyimpan/ memberikan jasa penjagaan
Musyarakah	: Percampuran
Muwaddi'	: Pihak yang menitipkan
Natuurlijke person	: Orang sebagai subjek hukum
Network	: Ekonomi jejaring
Oligopoli	: Pasar dimana penawaran suatu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan
Oligopsoni	: Keadaan dimana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal
Pacta sunt servanda	: Asas kepastian hukum dalam perjanjian
Perspiring	: Memeras keringat
Prive	: Pengambilan dana oleh pemilik perusahaan perorangan untuk keperluan pribadi yang akan mengurangi modal
Qiyas	: Menetapkan suatu hukum perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama
Rahn	: Gadai
Rechtspersoon	: Badan Hukum

Riba nasi'ah	: Pertambahan bersyarat yang diterima oleh pemberi utang sebagai kompensasi atas penangguhan pembayaran utang
Riba fadhl	: Kelebihan yang terjadi pada penjualan mata uang dengan mata uang, atau makanan dengan makanan
Ridha'iyah	: Rela sama rela
Riqab	: Budak
Sabilillah	: orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk mendirikan sekolah dan rumah sakit
Set back	: Kemunduran
Shahib al-mal	: Pemilik dana
Sighah	: Ijab qabul
Stakeholder	: Komunitas yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi
Tabarru'	: Kumpulan dana
Tadlis	: Penipuan
Takmir	: Pengurus masjid
Ta'limat	: Surat edaran
Tathawu'	: Sosial
Tijarah	: Komersil
Transfer payment wajib	: Zakat
Turmoil	: Kerusakan dan huru-hara
Ujrah	: Imbalan
Van rechtswegenietig	: Peraturan perundang-undangan yang batal demi hukum
Vereniging	: Perhimpunan/perkumpulan
Wadi'ah	: Titipan
Wakalah	: Perwakilan
Yurisprudensi	: Keputusan hakim terdahulu sebagai sumber hukum

DAFTAR SINGKATAN

ASPM	: Ahli Syariah Pasar Modal
BAZIS	: Badan Amil Zakat Infaq Sedekah
BI	: Bank Indonesia
BMT	: Baitul Maal wat Tamwil
BPR	: Bank Perkreditan Rakyat
BPRS	: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
BPS	: Biro Pusat Statistik
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bapepam-LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
CSR	: Corporate Social Responsibility
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
DSN	: Dewan Syariah Nasional
IDB	: Islamic Development Bank
KJKS	: Koperasi Jasa Keuangan Syariah
Kopotren	: Koperasi Pesantren
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
KSPPS	: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
KSUS	: Koperasi Serba Usaha Syariah
KUD	: Koperasi Unit Desa
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LBS	: Lembaga Bisnis Syariah
LKM	: Lembaga Keuangan Mikro
LPS	: Lembaga Perekonomian Syariah

LPSM	: Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat
Menkop dan UKM	: Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
OKI	: Organisasi Konferensi Islam
PBMT	: Perhimpunan BMT
PINBUK	: Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil
PDB	: Produk Domestik Bruto
PHBK	: Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat
SAW	: Shallallahu Alaihi Wassalam
Stb.	: Staatsblad
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah
UJKS	: Unit Jasa Keuangan Syariah
YINBUK	: Yayasan Inkubasi Usaha Kecil

BAB I

PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DALAM NASIONALISME EKONOMI INDONESIA

Pada bagian awal ini, penulis akan menguraikan Sistem Perekonomian Indonesia yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya adalah penguatan hukum BMT sebagai salah satu model ekonomi kerakyatan, hingga sistem ekonomi campuran antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem sosialis, serta dampaknya pada perekonomian Indonesia.

A. Perekonomian Nasional dan Permasalahannya

Sistem perekonomian Indonesia diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal 33 UUD NRI bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan oleh para pimpinan pemerintahan.¹ Pesan konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa yang dituju adalah sistem ekonomi tertentu yang bukan ekonomi kapitalis, namun suatu sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan berdasar atas asas kekeluargaan.²

¹ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 45 dalam Elli Ruslina, *Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*, Jurnal Konstitusi Edisi Maret 2012 Volume 9 Nomor 1, Jakarta, hlm. 50.

²Herman Soewardi, *Koperasi: Suatu Kumpulan Makalah*, Bandung: Ikopin, 1989, hlm. 413 dalam Elli Ruslina, *Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*, Jurnal Konstitusi Edisi Maret 2012 Volume 9 Nomor 1, Jakarta, hlm. 50.

Sistem Perekonomian Indonesia adalah Sistem Perekonomian Pancasila. Sistem Perekonomian Pancasila merupakan sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada dalam Sistem Perekonomian Pancasila tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan. Ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem perekonomian yang didasarkan pada lima sila dalam Pancasila. Menurut Mubyarto, Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi atau sistem perekonomian yang berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi komunis. Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang menerapkan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan nasional.³

Lebih lanjut, menurut Mubyarto⁴, ciri khas Sistem Ekonomi Pancasila sebagaimana diserap dari Pasal 33 UUD 1945, bahkan dari keseluruhan jiwa Pancasila itu sendiri, yaitu:

1. Dalam Sistem Ekonomi Pancasila, koperasi adalah sokoguru perekonomian. Koperasi adalah salah satu bentuk yang paling konkrit dari usaha bersama. Dalam Pasal 33 UUD 1945 dinyatakan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Hal ini berbeda sekali dengan ekonomi kapitalis, dimana roda perekonomian hanya digerakkan oleh rangsangan ekonomi saja. Walaupun masalah ekonomi menyangkut materi, namun hal itu tidaklah berarti bahwa materi itu tidak ada hubungannya dengan moral dan sosial. Kalau kita juga memperhatikan masalah moral dan sosial, di samping ekonomi, maka hal itu berarti kebijaksanaan dan tindakan ekonomi kita akan

³Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*, Jakarta: LP3ES, 1987, hlm. 32.

⁴*Ibid.*, hlm. 38-42.

berbeda, dibandingkan apabila yang kita kejar hanyalah rangsangan ekonomi saja.

3. Berhubungan dengan Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, Ekonomi Pancasila adalah kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan pemerataan sosial, egalitarianisme. Ada keinginan dalam masyarakat ekonomi kapitalis, bahwa yang penting “saya untung, kamu melarat”. Berbeda dengan itu, dalam ekonomi Pancasila, rasa solidaritas sosial menjiwai para pelaku di dalam tindak-tanduknya.
4. Berkaitan dengan Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, bahwa prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, yang berarti bahwa nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi. Hal tersebut sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis yang bersifat internasional, sejauh-jauhnya mencari pasar, kalau perlu sampai ke luar batas negara.
5. Dalam sistem perekonomian Pancasila, harus tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial.⁵

Menurut Emil Salim, seperti dikutip Mubyarto ⁶ , perkembangan yang dialami Indonesia selama lima puluh tahun terakhir mencerminkan gerak bandul antara dua kutub sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando, untuk menuju pada posisi ekuilibrium yang mungkin bisa diidentifikasi sebagai Sistem Ekonomi Pancasila. Selama lima puluh tahun terakhir, Indonesia mengalami dua kali sistem ekonomi liberal yang disusul masing-masing oleh sistem ekonomi komando. Pada esensinya, Ekonomi Pancasila adalah suatu konsep kebijaksanaan ekonomi, setelah mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan, hingga mencapai titik keseimbangan. Ke kanan artinya bebas

⁵ *Ibid.*, hlm. 53-57.

⁶ *Ibid.*, hlm. 110-111.

mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan terpusat. Secara sederhana, Ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau ekonomi pasar terkendali. Istilah lain yang mendekati pengertian Ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi campuran⁷, yaitu campuran antara sistem kapitalis⁸ dan sistem sosialis.⁹

⁷Siamanungkalit Rai, *Sistem Ekonomi Pancasila Untuk Sejahteraan Rakyat*, dalam http://www.kompasiana.com/simanungkalitrai/sistem-ekonomi-pancasila-untuk-sejahteraan-rakyat_55546c026523bd90144aef57, diakses pada 17 Januari 2017.

⁸ Sistem ekonomi kapitalis atau juga disebut sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem ekonomi yang kehidupan ekonomi masyarakatnya sangat dipengaruhi atau dikuasai oleh pemilik-pemilik kapital (modal). Sistem ini mula-mula berkembang di Inggris pada pertengahan abad ke 18, setelah Adam Smith yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Ekonomi menerbitkan buku *"The Wealth of Nations"*. Adam Smith mempunyai pandangan bahwa kepentingan pribadi merupakan kekuatan pengendali kehidupan ekonomi yang akan berjalan ke arah kemakmuran bangsa. Jika setiap orang diberi kebebasan, semuanya akan berusaha untuk mencapai kemakmuran bagi dirinya sendiri. Tidak akan ada orang menghendaki kemiskinan atau kesengsaraan bagi dirinya sendiri. Dengan demikian jika setiap individu sudah makmur, maka seluruh masyarakat akan makmur, sebab masyarakat tidak lain merupakan kumpulan individu. Kebebasan yang dimaksudkan Adam Smith, antara lain mencakup kebebasan menjalankan usaha, kebebasan memiliki alat-alat produksi, kebebasan menetapkan harga, kebebasan untuk mengadakan persaingan, kebebasan mengadakan perundingan. Dengan adanya kebebasan ini diharapkan adanya dorongan bagi setiap individu untuk bekerja lebih giat, berlomba ke arah kemajuan ekonomi, sehingga kemakmuran dapat ditingkatkan. Semboyan kaum liberal adalah *"laissez faire"* artinya biarkanlah. Semboyan ini mempunyai makna *"biarkanlah mereka melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka, biarkanlah produksi dan harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar bebas, tanpa adanya campur tangan pemerintah"*.

⁹ Sistem ekonomi sosialis atau sistem ekonomi terpimpin merupakan suatu sistem ekonomi di mana sebagian besar barang-barang modal/faktor-faktor produksi, dikuasai oleh negara yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai keseluruhan. Berbeda dengan kapitalisme yang menitikberatkan pada pandangan hidup individualisme, sosialisme menitikberatkan pada pandangan kolektivisme. Kolektivisme adalah pandangan yang mengajarkan bahwa di samping setiap orang

Kapitalisme sebagai sistem ekonomi, berkembang dan mencapai puncaknya dalam sistem sosial yang ditentukan oleh kekuasaan politik. Karena pengelolaan sistem ekonomi dilakukan secara politik, kapitalisme menghasilkan perbedaan kelas ekonomi dengan menciptakan hubungan-hubungan dalam proses produksi menurut konsep pemilik modal (kapitalis) dan pekerja (buruh). Hubungan-hubungan dalam proses produksi yang demikian, menjadikan politik basis (infrastruktur) sistem ekonomi. Sehingga pemilik modal dengan kekuasaannya yang besar atas modal menentukan sistem perburuhan yang meliputi kebijakan produksi, upah, dan investasi yang menimbulkan kesengsaraan bagi kelas sosial ekonomi pekerja (buruh) yang semakin lama semakin memburuk. Hal ini menyebabkan lahirnya sistem ekonomi sosialis, yang menurut Marx sosialisme lahir bukan karena lebih baik daripada kapitalisme, melainkan karena terpenuhinya syarat-syarat objektif dalam masyarakat berupa pemelaratan yang terus-menerus terhadap kaum buruh akan melahirkan perlawanan (revolusi) pada penciptaan keadilan yang berkembang dari kapitalisme ke sosialisme ilmiah, lalu ke komunisme.¹⁰

Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah ikut campur dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Namun demikian, campur tangan tersebut tidak menghapus kegiatan ekonomi yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Seperti dikemukakan oleh Partadiredja, seorang pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, sebagaimana dikutip Rowland Pasaribu, sebagian besar negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, menganut sistem ekonomi campuran. Terdapat pemilikan swasta perseorangan atas alat-alat produksi yang berdampingan dengan pemilikan negara, dan

sebagai warga masyarakat, masyarakat sebagai keseluruhan merupakan satuan tersendiri yang mempunyai kepentingan yang hendaknya dipenuhi terlebih dahulu daripada kepentingan perseorangan.

¹⁰ T.M. Soerjanto Poespowardojo dan Alexander Seran, *Diskursus Teori-teori Kritis: Kritik atas Kapitalisme Klasik, Modern, dan Kontemporer*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016, hlm. 39-41.

bahkan pemilikan kelompok-kelompok persekutuan adat. Mekanisme harga dan pasar bebas, hidup berdampingan dengan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagian besar harga barang dan jasa dan faktor produksi ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Pemerintah juga mempengaruhi kekuatan permintaan dan penawaran tersebut melalui kebijaksanaan harga, termasuk penetapan upah minimum.¹¹

Sistem ekonomi campuran yang diterapkan oleh banyak negara tidak selalu sama. Ada yang kadar kapitalismenya lebih tinggi seperti Amerika Serikat, Hongkong, Singapura. Ada pula yang bobot sosialismenya lebih besar seperti India. Untuk mengetahui apakah suatu negara condong ke arah sistem ekonomi liberal atau sebaliknya, terdapat ukuran yang disebut indeks kebebasan ekonomi yang dikembangkan oleh Milton Friedman yang tergabung dalam *Economic Freedom Network*. Indeks kebebasan ekonomi dibangun atas 17 komponen, diantaranya menyangkut aspek operasi (campur tangan) pemerintah dan struktur ekonomi. Skala indeks bergerak dari 0 sampai 10. Negara dengan indeks lebih tinggi menunjukkan konsistensi yang kuat pada sistem ekonomi liberal. Dengan menggunakan indeks kebebasan ekonomi dari Milton Friedman, sistem ekonomi yang paling liberal di dunia adalah Hongkong (9,3), disusul oleh Singapura (8,2), Selandia Baru (8,0) dan Amerika Serikat (7,6). Sementara itu di tingkat ASEAN, tercatat Thailand (7,2), Filipina (7,0), Malaysia (7,0), Indonesia (6,3). Perekonomian Indonesia dalam kurun waktu 1975-1995 tampak semakin liberal dengan Bergeraknya indeks kebebasan ekonomi dari 5,2 pada tahun 1975 menjadi 6,3 pada tahun 1995.¹²

¹¹ Rowland Pasaribu, *Sistem Perekonomian Indonesia*, dalam http://rowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id, diakses pada 17 Januari 2017.

¹² Rowland Pasaribu, *Sistem Perekonomian Indonesia*, dalam http://rowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id, diakses pada 17 Januari 2017.

Saat indeks kebebasan ekonomi Indonesia semakin meningkat (tampak semakin liberal), sistem ekonomi kerakyatan memperkuat struktur perekonomian nasional saat terjadi krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari peran usaha besar atau konglomerat. Sejak awal pemerintah Orde Baru selama 32 tahun terakhir, Indonesia berhasil mengejar pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8% per tahun. Tingkat pertumbuhan yang tinggi dikarenakan pengaruh sistem ekonomi konglomerasi yang menguasai usaha dari hulu ke hilir yang jumlahnya tidak kurang dari tiga ratus usaha. Usaha besar dari sistem konglomerasi juga berperan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) yakni tidak kurang dari 61% menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 1996. Namun, keberhasilan yang dicapai tidak lebih baik dibandingkan dengan kegagalan atau dampak-dampak negatif yang ditinggalkan. Terjadinya sistem ekonomi konglomerasi, banyak praktik-pratik bisnis yang tidak wajar seperti monopoli, oligopoli, monopsoni, dan oligopsoni, selain itu sistem ekonomi konglomerasi juga tidak mengakar pada rakyat atau *foot loose* dan makin memperlebar jurang kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin antarwilayah atau antarsektor. Hal ini semakin terasa setelah terjadinya krisis moneter yang berawal pada pertengahan tahun 1997 dan berkembang menjadi krisis ekonomi dan krisis kepercayaan kepada pemerintah. Dampak terburuk adalah tingginya tingkat inflasi yang diperkirakan mencapai 80% di tahun 1998, tingginya pengangguran (sampai dengan Juni 1998 diperkirakan tidak kurang dari 17 juta orang), pertumbuhan ekonomi negatif 13,2%, dan tingkat kemiskinan mengalami kemunduran (*set-back*) seperti tahun 1970-an yaitu mencapai 79,4 juta orang atau hampir 40% dari jumlah penduduk.¹³

¹³ Soeharto Prawirokusumo, *Ekonomi Rakyat (Konsep, Kebijakan, dan Strategi) Edisi Pertama*, Yogyakarta: BPFE, 2009, hlm. 3-4.

Dimulai dari melemahnya mata uang Bath Thailand terhadap Dolar Amerika Serikat yang kemudian menjalar ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Banyak orang, perusahaan, bahkan negara yang utangnya menumpuk karena mata uang domestik terdepresiasi terhadap mata uang asing. Perkembangan ekonomi yang diraih sebelumnya hanyalah perkembangan semu karena tidak ditopang dengan fundamental ekonomi yang kuat. Lebih bersumber dari memeras keringat (*perspiring*) seperti ditunjukkan oleh ekspor yang didominasi pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi dengan nilai rendah. Bukan ditarik oleh ekspor yang mempunyai nilai tambah (*inspiring*).¹⁴

Ekonomi Indonesia yang semula diprediksi lebih memiliki fundamental ekonomi yang kuat, kenyataannya rupiah juga mengalami depresiasi. Selain tidak ditopang oleh fundamental ekonomi yang kuat, juga dipengaruhi oleh sistem ekonomi moneter yang digunakan. Joseph A. Schumpeter, sebagaimana dikutip A. Riawan Amin menyatakan bahwa setiap kemajuan yang dicapai sistem ekonomi kapitalis adalah tidak berarti, kecuali kerusuhan dan huru-hara (*turmoil*). Ibaratnya balon yang terus dipompa, ia akan terus menggelembung, dan dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi sebagai indikator kemakmuran. Kemampuan sektor riil untuk tumbuh ada batasnya, sedangkan sektor moneter yang bisa menggandakan uang jauh meninggalkan sektor riil. Ketidakseimbangan inilah yang dapat meletus setiap saat. Gelembung balon ekonomi yang terus dipompa tidak kuat lagi menahan beban sehingga letupan besar terjadi dan itulah krisis ekonomi.¹⁵

Bertitik tolak dari gambaran krisis ekonomi tersebut, membuktikan bahwa sistem ekonomi konglomerasi sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan. Untuk itulah, pada era reformasi, paradigma pembangunan perlu diubah.

¹⁴ A. Riawan Amin, *Satanic Finance, True Conspiracies*, Jakarta: Celestial Publishing, 2008, hlm. 4-6.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 8-10.

Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok. Pembangunan harus dikembangkan dengan berbasiskan ekonomi domestik pada daerah kabupaten, tingkat kemandirian yang tinggi, adanya kepercayaan diri dan kesetaraan, meluasnya kesempatan berusaha dan pendapatan, partisipatif, adanya persaingan sehat, keterbukaan/demokrasi, pemerataan yang berkeadilan, serta didukung dengan industri yang berbasis sumber daya alam, yang kesemuanya adalah ciri-ciri dari sistem ekonomi kerakyatan. Beberapa model sistem ekonomi kerakyatan yang dapat dikembangkan antara lain industri pedesaan, industrialisasi di desa, lumbung desa, inti plasma, sentra industri, *mixed farming*, hutan untuk rakyat, *organic farming*, inkubator, pola terpadu/model di Karangayar, kawasan industri masyarakat perkebunan, dan *Baitul Maal wat Tamwil* (selanjutnya disingkat BMT). Model-model sistem ekonomi kerakyatan tersebut dapat diupayakan dan diusahakan melalui pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kontribusi usaha kecil dalam pembangunan ekonomi dapat menyerap lebih dari 88% tenaga kerja dan mampu menyumbang pada PDB sebesar 38,9%.¹⁶

Dalam konteks nasional jika mencermati perkembangan empiris yang ada, kesan kuat yang muncul adalah sektor ekonomi rakyat justru menjadi katup pengaman bagi perekonomian Indonesia. Pada masa perekonomian stabil, ekonomi rakyat berkembang secara alami, tanpa terlalu banyak mendapatkan bantuan dan perlindungan dari pemerintah, serta terus tumbuh dan memberi andil pada pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun secara proporsional pertumbuhannya lebih lamban dibanding sektor ekonomi yang besar dan modern. Adapun dalam masa krisis, ekonomi rakyat justru menjadi penyelamat kemerosotan yang cukup besar dalam perekonomian nasional, meski menerima limpahan beban

¹⁶ Soeharto Prawirokusumo, *op. cit.*, hlm. 4.

kebangkrutan ekonomi yang disebabkan oleh sektor ekonomi yang besar dan modern yang hanya ditopang oleh utang.¹⁷

Dalam kaitan itu, lebih lanjut menurut Asykuri Ibn Chamim, dkk¹⁸, beberapa alasan ketahanan ekonomi kerakyatan di tengah krisis yang melanda Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Terkait dengan struktur PDB Indonesia yang lebih banyak disumbang oleh besarnya pengeluaran konsumsi yang pada umumnya memiliki pola permintaan inelastik terhadap pendapatan. Barang-barang tersebut dihasilkan oleh sektor ekonomi rakyat.
2. Sektor ekonomi rakyat tidak banyak mengandalkan sumber dana dari pihak ketiga, sehingga meskipun sektor keuangan dilanda krisis, hal ini tidak banyak berpengaruh terhadap usaha ekonomi rakyat.
3. Sektor ekonomi rakyat fleksibel untuk keluar masuk pasar, menyesuaikan dengan situasi permintaan yang ada, sehingga sektor ekonomi rakyat dapat tetap bertahan di pasar dalam kondisi apapun.

Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki potensi besar, namun tidak kemudian menjauhkannya dari berbagai persoalan, persoalan UMKM saat ini sangat berat karena ketatnya persaingan, apalagi dengan masuknya produk-produk luar negeri, iklim usaha, kesulitan mengakses permodalan, pengelolaan usaha yang masih tradisional, kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, serta skala dan teknik produksi yang masih rendah. Oleh karena itu, untuk mengembangkan dan memberdayakan UMKM, diperlukan lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelaku ekonomi rakyat

¹⁷ Asykuri Ibn Chamim, dkk, *Civic Education Pendidikan Kewarganegaraan, edisi revisi*, Yogyakarta: Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan LP3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan The Asia Foundation, 2003, hlm. 336.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 336-337.

itu sendiri.¹⁹ Basis ekonomi rakyat sebagai tulang punggung prinsip demokrasi ekonomi belum berhasil dibangun secara kuat dan berkelanjutan. Perubahan peta politik dunia dengan gelombang demokratisasinya dan perubahan ekonomi global dengan dukungan sistem ekonomi pasarnya, menuntut pemerintah Indonesia melakukan penyesuaian-penyesuaian yang tak terhindarkan dalam pola kebijakan ekonominya. Karena itu, kecenderungan efisiensi melalui kebijakan deregulasi, debirokratisasi, dan bahkan swastanisasi juga merasuk ke dalam politik perekonomian nasional.²⁰

Berdasarkan data *The Human Freedom Index 2016*, peringkat Indonesia dalam iklim kebebasan ekonomi adalah peringkat 72 dari 159 negara²¹, sedangkan kontribusi Usaha Kecil Menengah (UKM) menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 dapat menyerap 96,71% tenaga kerja, dan menyumbang pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,41%.²² Dalam pandangan ekonomi kerakyatan, demokrasi politik saja tidak mencukupi bagi rakyat banyak untuk dapat mengendalikan jalannya roda perekonomian, tetapi juga diperlukan peningkatan kesadaran rakyat banyak untuk memperjuangkan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya kepada negara dalam perspektif hak asasi manusia, sebab sebagaimana dalam berbagai bidang kehidupan lainnya, persaingan politik tidak mungkin dapat dipisahkan dari

¹⁹ Ramdhan Syah, *Pengembangan Model Pendanaan UMKM Berdasarkan Persepsi UMKM*, Jurnal Keuangan dan Bisnis, Vol. 5, No. 1, Maret. 2013, hlm. 30.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 275-276.

²¹ Cato Institute, Fraser Institute, Friedrich Naumann Foundation for Freedom, *The Human Freedom Index 2016*; Fraser Institute, *Economic Freedom of the World: 2016 Annual Report*, dalam <https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom>, diakses pada 14 Juni 2017.

²² Paparan Sekretaris Kementerian KUKM dalam http://www.depkop.go.id/pdf-viewer/?p=uploads/tx_rtgfiles/01._Paparan_Sekretaris_Kementerian_KUKM.pdf diakses pada 14 Juni 2017.

kapitalisme. Dengan demikian, walaupun suatu masyarakat berusaha mengembangkan sistem politik yang secara prosedural tergolong demokratis, tetapi jaringan kekuatan kapital akan tetap berusaha untuk melakukan segala upaya untuk mempengaruhi pilihan-pilihan politik masyarakat.²³

Dikemukakan oleh Gramsci dalam Sugiono, sebagaimana dikutip Revrisond Baswir, sesungguhnya kaum kapitalis tidak hanya cenderung memanfaatkan negara sebagai sarana untuk melindungi dan memajukan kepentingan kelas mereka, tetapi juga melalui kekuatan kapital yang mereka miliki, demokrasi pun cenderung mereka telikung untuk melestarikan posisi dominan mereka di tengah-tengah masyarakat. Hal itu antara lain dapat mereka lakukan dengan memberi dukungan pembiayaan kepada kandidat atau partai politik yang memperjuangkan kelas mereka, dengan menghambat proses penguatan kelembagaan pada kelompok masyarakat yang mereka eksploitasi, dengan menguasai dan memanipulasi penyebaran informasi, serta dengan melakukan komersialisasi pendidikan. Untuk menghadapi kelicikan kaum kapitalis tersebut, tentu tidak ada pilihan lain bagi rakyat banyak seperti kaum buruh, kaum tani, kaum nelayan, kaum miskin kota, dan para pelaku ekonomi rakyat pada umumnya, kecuali berusaha sekuat tenaga untuk mempersenjatai diri mereka dengan dukungan kapital yang cukup, baik secara material, institusional, maupun intelektual.²⁴

Menurut Mubyarto, sebagaimana dikutip Bernhard Limbong²⁵, sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Dalam praktiknya, ekonomi kerakyatan dapat dijelaskan juga sebagai ekonomi jejaring (*network*) yang menghubungkan-hubungkan sentra-sentra inovasi, produksi, dan

²³ Revrisond Baswir, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 99.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 100-101.

²⁵ Bernhard Limbong, *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*, cet. 2, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2013, hlm. 86.

kemandirian usaha masyarakat ke dalam suatu jaringan berbasis teknologi informasi, untuk terbentuknya jejaring pasar domestik di antara sentra dan pelaku usaha masyarakat. Ciri khas ekonomi kerakyatan, menurut Mohammad Hatta sebagaimana dikutip Bernhard Limbong²⁶, terdiri dari enam poin berikut:

1. Peranan vital negara. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945, negara memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Peranan tersebut tidak hanya terbatas sebagai pengatur jalannya roda perekonomian, melalui pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), negara dapat terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi tersebut. Tujuannya adalah untuk menjamin agar kemakmuran masyarakat senantiasa lebih diutamakan daripada kemakmuran orang seorang, dan agar tampuk produksi tidak jatuh ke tangan orang seorang, yang memungkinkan ditindasnya rakyat banyak oleh segelintir orang yang berkuasa.
2. Efisiensi ekonomi berdasar atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan. Tidak benar jika dikatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan cenderung mengabaikan efisiensi dan bersifat anti pasar. Efisiensi dalam sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya dipahami dalam perspektif jangka pendek dan berdimensi keuangan, melainkan dipahami secara komprehensif dalam arti memperhatikan, baik aspek kualitatif dan kuantitatif, keuangan dan nonkeuangan, maupun aspek kelestarian lingkungan. Politik ekonomi kerakyatan memang tidak didasarkan atas pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas, melainkan atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan.
3. Mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar, dan kerja sama (kooperasi). Mekanisme alokasi dalam sistem ekonomi kerakyatan, kecuali untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang

²⁶*Ibid.*, hlm. 83.

menguasai hajat hidup orang banyak, tetap didasarkan atas mekanisme pasar. Namun, mekanisme pasar bukan satu-satunya. Selain melalui mekanisme pasar, alokasi juga didorong untuk diselenggarakan melalui mekanisme usaha bersama (koperasi). Mekanisme pasar dan koperasi dapat diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang sama dalam mekanisme alokasi sistem ekonomi kerakyatan.

4. Pemerataan penguasaan faktor produksi. Dalam rangka itu, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, penyelenggaraan pasar dan koperasi dalam sistem ekonomi kerakyatan harus dilakukan dengan terus menerus melakukan penataan kelembagaan, yaitu dengan cara meratakan penguasaan modal atau faktor-faktor produksi kepada segenap lapisan anggota masyarakat. Proses sistematis untuk mendemokratisasikan penguasaan faktor-faktor produksi atau peningkatan kedaulatan ekonomi rakyat inilah yang menjadi substansi sistem ekonomi kerakyatan.
5. Koperasi sebagai sokoguru perekonomian. Dilihat dari sudut Pasal 33 UUD 1945, keikutsertaan anggota masyarakat dalam memiliki faktor-faktor produksi itulah antara lain yang menyebabkan dinyatakan koperasi sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana diketahui, perbedaan koperasi dengan perusahaan perseroan terletak pada diterapkannya prinsip keterbukaan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam lapangan usaha yang dijalankan oleh koperasi untuk turut menjadi anggota koperasi.
6. Kepemilikan saham oleh pekerja. Dengan diangkatnya kerakyatan atau demokrasi sebagai prinsip dasar sistem perekonomian Indonesia, prinsip itu dengan sendirinya tidak hanya memiliki kedudukan penting dalam menentukan corak perekonomian yang harus diselenggarakan oleh negara pada tingkat makro. Ia juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan corak perusahaan yang harus dikembangkan

pada tingkat mikro. Perusahaan hendaknya dikembangkan sebagai bangun usaha yang dimiliki dan dikelola secara kolektif (kooperatif) melalui penerapan pola-pola kepemilikan saham oleh pekerja. Penegakan kedaulatan ekonomi rakyat dan pengutamaan kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang hanya dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip tersebut.

B. Dimensi *Baitul Maal wat Tamwil*

BMT yang disebut juga dengan Balai-usaha Mandiri Terpadu sebagai salah satu model sistem ekonomi kerakyatan, merupakan lembaga keuangan bukan bank atau lembaga keuangan mikro (LKM) yang memiliki tiga dimensi yaitu fungsi regulasi, fungsi permodalan, dan fungsi pemberdayaan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah sebagai dasar operasi BMT adalah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi, yaitu:²⁷

1. Prinsip *tauhidi*, yang berorientasi pada pengabdian kepada Allah Swt. (dimensi '*ubudiyyah*),
2. Prinsip persamaan dalam aktivitas ekonomi yang berkenaan dengan hak dan kewajiban,
3. Prinsip tidak merugikan dan mengeksploitasi manusia dalam berbagai bentuk bidang usaha,
4. Prinsip kerelaan kedua belah pihak atau asas suka sama suka (*'an taradhin minkum*) tanpa unsur paksaan dalam transaksi bisnis,
5. Prinsip persaudaraan dalam membangun kemitraan dan solidaritas global serta prinsip keadilan universal,
6. Prinsip objek materi bisnis, berupa produk barang atau jasa yang terbukti halal,
7. Prinsip memberi manfaat atau asas manfaat (tidak mengandung kemubadziran),
8. Prinsip saling membantu dan menolong untuk membangun kemitraan dalam bisnis,

²⁷Elfrinaldi, *Syariat Islam dan Dinamika Masyarakat, Solusi Terhadap Kontemporer*, Jakarta: Ricardo, tanpa tahun, hlm. 31-40.

9. Prinsip keseimbangan (*equilibrium*) antara kepentingan individu dan masyarakat dengan pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata,
10. Prinsip tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau asas tidak melawan hukum dan syari'at (tidak ada unsur riba, *gharar*, *maysir*)

Macam riba adalah riba *nasi'ah* dan riba *fadhl*. Riba *nasi'ah* adalah pertambahan bersyarat yang diterima oleh pemberi utang sebagai kompensasi atas penangguhan pembayaran utang. Riba *fadhl* adalah kelebihan yang terjadi pada penjualan mata uang dengan mata uang, makanan dengan makanan.²⁸ Transaksi pada riba *fadhl*, juga mengandung unsur yang dilarang yaitu *gharar* atau ketidakjelasan bagi kedua belah pihak dan berdampak pada ketidakadilan. Islam juga melarang *maysir* atau judi yang sudah menjadi budaya di negara maju. Dengan dialokasikannya sumber daya dalam perjudian, maka nilai tambah perekonomian akan terhenti dan berpotensi pada pengumpulan atau transfer sumber daya ekonomi dari pihak yang produktif ke tidak produktif.²⁹

Dalam suatu lembaga BMT terdapat dua manajemen keuangan di dalamnya, yakni *baitul maal* dan *baitut tamwil*. Secara bahasa *baitul maal* adalah rumah harta, sedangkan *baitut tamwil* adalah pengembangan harta. Manajemen keuangan *baitul maal* meliputi pengumpulan dan penyaluran dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) dari masyarakat yang dananya dapat bersumber dari anggotanya sendiri atau pun masyarakat luas yang mempercayakan pengelolaan dana ZIS nya kepada BMT tersebut, sedangkan *baitul tamwil* adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung.

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Jilid 3*, diterjemahkan oleh Asep Sobari, dkk. Jakarta: Al-I'tishom. 2010, hlm. 333-334.

²⁹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008, hlm. 1-2.

Pada mulanya BMT adalah *baitul maal*. Nama *baitul maal* berasal dari Bahasa Arab, yaitu dari kata *bait* yang artinya rumah, dan *maal* yang berarti harta. *Baitul maal* berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. *Baitul maal* adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Dengan demikian, munculnya nama *baitul maal* pada masa itu adalah terkait dengan urusan negara berkenaan dengan pengelolaan harta baik berupa uang maupun barang sebagaimana Rasulullah Saw. (1-11 H/622-632M) memperlakukan *ghanimah* (harta rampasan perang) yang diperoleh pada Perang Badar. Rasulullah Saw. senantiasa membagikan *ghanimah* dan seperlima bagian darinya setelah usainya peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi. Pengelolaan *baitul maal* pada masa Rasulullah Saw. adalah mengelola harta umat oleh negara dengan menghalalkan pengelolanya mengambil sebagian dari harta tersebut secukupnya hak amil sebanyak-banyaknya 12,5% atau 1/8 bagian, terus berlangsung sampai dengan masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib (35-40 H/656-661 M). Masa setelah kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, pengelolaan *baitul maal* berada sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat. Dalam perkembangan selanjutnya (masa Dinasti Abbasiyah dan Umayyah), *baitul maal* telah menjadi lembaga penting bagi negara, mulai dari penarikan zakat, *ghanimah*, *kharaj*, sampai membangun jalan, menggaji tentara, dan juga pejabat negara serta membangun sarana sosial.³⁰

Dalam pengertian *baitul maal* yang sekarang, khususnya di Indonesia menjadi menyempit. *Baitul maal* tidak lagi menjalankan tugas luas yang dahulunya dilakukan oleh pemerintah atau negara sebagaimana masa kekhalifahan. BMT lebih diartikan sebagai lembaga sosial untuk menyalurkan

³⁰ Said Hisyam, *Apa Itu BMT?*, dalam Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, dkk, *BMT Praktik dan Kasus*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 3.

zakat, infaq, sedekah atau sebagai lembaga amil saja, dengan pelaksanaannya tidak hanya pemerintah saja, tapi swasta juga dapat melakukannya. Pelaksana *baitul maal* oleh pemerintah, kita kenal dengan nama BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah) didorong oleh rekomendasi pertemuan sebelas tokoh ulama nasional yang berkumpul di Jakarta pada 24 September 1968, untuk membahas beberapa persoalan umat, khususnya pelaksanaan zakat di Indonesia. Hal tersebut selanjutnya ditanggapi positif oleh Presiden dengan memberikan seruan dan edaran kepada para pejabat dan instansi terkait untuk menyebarluaskan dan membantu terlaksananya pengumpulan zakat secara nasional.³¹

Selanjutnya, *baitul maal* dikembangkan dengan kelengkapannya sebagai *baitul tamwil*. Didorong oleh kesadaran akan perlunya perbaikan ekonomi umat, dirasakan keberadaan *baitul maal* perlu diperluas fungsinya tidak hanya sebagai lembaga sosial saja yang hanya menyalurkan dana-dana zakat, infaq, dan sedekah, namun juga dana yang ditumbuhkembangkan sebagai modal umat untuk melakukan kegiatan usaha sehingga mampu meningkatkan kondisi ekonomi umat. Dimulai dari ide para aktivis Masjid Salman Institut Teknologi Bandung yang mendirikan Koperasi Jasa Keahlian Teknosa pada tahun 1980 yang dikenal dengan *Baitul Tamwil* Teknosa. Tahun 1988 menyusul berdirinya Koperasi Ridho Gusti, dan tahun 1992 muncul lembaga yang menggabungkan nama *Baitul Maal* dan *Tamwil* dengan nama BMT Insan Kamil.³²

Lembaga keuangan BMT sangat diperlukan untuk menjangkau dan mendukung para pengusaha mikro dan kecil di seluruh pelosok Indonesia yang belum dilayani oleh perbankan yang ada pada saat ini. Sebagai gambaran, usaha mikro kecil (BMT) yang merupakan sektor informal, menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencapai kekayaan lebih dari Rp 40.000.000,00. Peluang

³¹ *Ibid.*, hlm. 4.

³² *Ibid.*, hlm. 5.

pengembangan BMT di Indonesia sangat besar, mengingat usaha mikro dengan skala pinjaman di bawah Rp 5.000.000,00 adalah segmen pasar yang dapat dilayani dengan efektif oleh lembaga ini. Di sisi lain, keberadaan perbankan yang mampu melayani segmen ini sangat terbatas jumlahnya.³³ Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi operasionalisasi di daerah. Di samping itu, kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan, muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat, sebagaimana hadist Rasulullah saw. bahwa, “kefakiran itu mendekati kekufuran”, maka keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat. Keberadaan rentenir di tengah-tengah masyarakat, dapat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus dalam masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini.³⁴

Mengenai lembaga keuangan, BMT adalah lembaga keuangan syariah bukan bank. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-keduanya. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya

³³ Nurul Huda, dkk, *Baitul Maal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis*, Jakarta: Amzah, 2016, hlm. 36.

³⁴ Heri Sudarsono, *op.cit.*, hlm. 104.

menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau keduanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Dalam praktiknya, lembaga keuangan digolongkan ke dalam dua golongan besar yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.³⁵ Sistem keuangan di Indonesia dilaksanakan dengan sistem ekonomi ganda (*dual economic sistem*), yaitu sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah. Dari sisi pemenuhan prinsip syariah, otoritas ada pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), secara kelembagaan ada pada lembaga keuangan yang beroperasi sesuai syariah, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengawasan dari sisi operasional, yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia. Di samping itu, untuk menengahi persengketaan yang terjadi pada lembaga keuangan syariah ada Badan Arbitrase Syariah Nasional.³⁶

Secara umum, lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:³⁷

1. Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Masing-masing lembaga keuangan bukan bank mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Lembaga keuangan bukan bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Departemen Keuangan yang dijalankan oleh

³⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 2.

³⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015, hlm. 40.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 45.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan disingkat menjadi Bapepam-LK, yang saat ini peran Bapepam-LK digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh DSN MUI. Lembaga keuangan bukan bank antara lain terdiri dari:

- a. Pasar modal,
- b. Pasar uang,
- c. Perusahaan asuransi,
- d. Dana pensiun,
- e. Perusahaan modal ventura,
- f. Lembaga pembiayaan yang terdiri dari:
 - 1) Perusahaan sewa guna usaha (*leasing*),
 - 2) Perusahaan anjak piutang (*factoring*),
 - 3) Perusahaan kartu plastik,
 - 4) Pembiayaan konsumen,
- g. Perusahaan pegadaian,
- h. Lembaga keuangan syariah mikro yang terdiri dari:
 - 1) Lembaga pengelola zakat, seperti Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ),
 - 2) Lembaga pengelola wakaf,
 - 3) *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Lembaga keuangan syariah berfungsi menyediakan jasa perantara bagi pemilik modal dengan perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam dunia bisnis, sehingga uang dari masyarakat dapat dikumpulkan melalui berbagai bentuk produk penghimpunan dana sebelum disalurkan kembali kepada yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Pada tataran praktis, keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah sekarang ini menunjukkan adanya perkembangan yang semakin pesat. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar umat Islam untuk melaksanakan Islam secara sempurna atau *kaffah*. Perkembangan ini tentu memberikan harapan baru bagi para pelaku usaha untuk

menjalankan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materiil semata, tetapi juga sesuai dengan spirit hukum syariah yang menjanjikan pemenuhan kebutuhan batiniah, namun nilai-nilai keseimbangan ini tentu tidak boleh berjalan sendiri tanpa adanya upaya kodifikasi ilmu pengetahuan hukum.³⁸

BMT hanya ada di negara Indonesia, namun begitu di negara lain terdapat suatu institusi yang mirip dengan BMT, yaitu *Grameen Bank* (Bank Desa) di Bangladesh dan Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) di Malaysia. *Grameen Bank* di Bangladesh dipelopori oleh Muhammad Yunus. *Grameen Bank* merupakan bank swasta khusus yang 94% sahamnya dikuasai oleh para peminjam miskin sendiri, sedangkan sisanya 6% dimiliki oleh pemerintah. Latar belakang pendirian *Grameen Bank* disebabkan sebagian besar penduduk pedesaan Bangladesh termasuk miskin. Sebelumnya *Grameen Bank* adalah lembaga kredit mikro tanpa agunan kepada kaum miskin yang tidak dapat mengakses pinjaman di bank. Pada tahun 1976, Muhammad Yunus mentransformasi lembaga kreditnya menjadi bank formal dengan aturan khusus bernama *Grameen Bank*. *Grameen Bank* memberikan kredit tanpa agunan berbunga rendah kepada mereka yang termiskin dari golongan miskin.³⁹

Begitu pula dengan AIM di Malaysia, AIM merupakan contoh lembaga keuangan mikro yang dibentuk dalam upaya pengentasan kemiskinan. AIM bekerja dengan sasaran rumah tangga miskin melalui pembiayaan efektif. Perbedaan antara BMT dengan kedua institusi tersebut di atas adalah *pertama*, BMT merupakan institusi yang tumbuh dan berkembang dari inspirasi dan kebutuhan masyarakat (*bottom up*), bukan proyek pemerintah seperti halnya

³⁸ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 2.

³⁹ M. Kertajaya, *Inspirasi Ekonomi yang Mengubah Dunia*, Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2012, hlm. 212-213.

Grameen Bank dan AIM. *Kedua*, dalam beroperasinya BMT menggunakan konsep akad berdasarkan prinsip ekonomi syariah, sedangkan *Grameen Bank* dan AIM berlandaskan dan menggunakan sistem ekonomi konvensional.⁴⁰

Keberadaan BMT sebagai salah satu perintis lembaga keuangan syariah sangat diperlukan untuk menjangkau dan mendukung para pengusaha mikro dan kecil di seluruh pelosok Indonesia yang belum dilayani oleh perbankan yang ada pada saat ini. Dalam kerangka sistem ekonomi Islam, tujuan BMT dapat berperan melakukan beberapa hal, yaitu:⁴¹

1. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan,
2. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat,
3. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah,
4. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung,
5. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan memberikan bimbingan atau konsultasi bagi anggota di bidang usahanya,
6. Meningkatkan wawasan atau kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam,
7. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman dan,
8. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Secara kelembagaan, BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Sementara PINBUK itu sendiri harus mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung Program Proyek

⁴⁰Lihat Neni Sri Imayati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 78-83.

⁴¹Nurul Huda, dkk, *op.cit.*, hlm. 40-41.

Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI).

PINBUK⁴² sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam praktiknya, PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya, BMT menetaskan usaha kecil.⁴³ Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat di mana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat. Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan prinsip syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup akan ilmu pengetahuan dan materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.⁴⁴ Seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak bisa terlepas dari nilai-nilai kerohanian terutama tauhid. Selain nilai kerohanian, keberadaan BMT merupakan pengejawantahan nilai sosial (*baitul maal*), nilai ekonomi (*baitut tamwil*), serta nilai budaya, yaitu ekonomi kerakyatan, dimana BMT adalah representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, sehingga BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.

⁴² PINBUK merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK). YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan akta notaris Leila Yudoparipurno, S.H. Nomor 5 Tanggal 13 Maret 1995.

⁴³ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 431 dalam Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008, hlm. 103.

⁴⁴ *Ibid.*

Jumlah BMT berdasarkan data PINBUK di tahun 2011 adalah 3.037 BMT dengan rincian sebagai berikut

Tabel 1
PINBUK dan Pengalaman Pengembangan BMT
di Indonesia⁴⁵

PINBUK dan Pengalaman Pengembangan BMT di Indonesia						
No	Provinsi	Jml BMT Beraset >Rp. 1 Milyar	Jml BMT Beraset Rp. 500 Tr - 1 Milyar	Jml BMT Beraset Rp. 150 - 500 Tr	Jml BMT Beraset Rp. 50 - 150 Tr	Jml BMT Beraset < Rp. 50 Tr
1	NAD	2	7	23	37	7
2	Sumatera Utara	1	8	53	87	7
3	Sumatera Barat	1	8	17	28	9
4	Riau	2	5	20	23	15
5	Jambi	-	1	2	5	3
6	Bengkulu	1	1	10	5	4
7	Sumatera Selatan	3	3	14	38	9
8	Lampung	4	1	14	19	7
9	Jakarta	5	36	53	55	16
10	Jawa Barat	7	23	290	293	24
11	Jawa Tengah	75	9	215	225	49
12	Yogyakarta	3	10	29	14	9
13	Jawa Timur	8	32	271	230	62
14	Bali	1	6	4	3	1
15	Kalimantan Barat	12	1	5	7	2
16	Kalimantan Tengah	-	1	4	3	2
17	Kalimantan Timur	2	9	7	4	2
18	Kalimantan Selatan	3	4	5	4	1
19	Sulawesi Utara	-	1	21	31	9
20	Sulawesi Tengah	2	1	4	2	2
21	Sulawesi Tenggara	-	1	11	7	4
22	Sulawesi Selatan	10	51	71	83	29
23	Nusa Tenggara Barat	1	4	41	39	8
24	Nusa Tenggara Timur	-	1	2	4	1
25	Maluku	1	-	10	7	4
26	Papua	3	2	6	7	3
	Total	135	226	1.202	1.260	289
						3.037

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM), Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, menyatakan pertumbuhan BMT cukup signifikan. Berdasarkan data Perhimpunan BMT (PBMT), terdapat 4.500 BMT tersebar di Indonesia di tahun 2015 yang melayani 3,7 juta orang dengan aset sekitar Rp 16 triliun yang dikelola sekitar 20 ribu orang. Data di Kementerian koperasi dan UKM menunjukkan jumlah unit usaha koperasi di Indonesia mencapai 150.223 unit usaha, dimana terdapat 1,5 persen koperasi yang berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), yang sekarang

⁴⁵Eli Priyatna Laidan, *Selayang Pandang PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil)* <https://www.slideshare.net/dasepbux/profil-pinbuk-lengka-pok>, diakses pada tanggal 5 September 2017.

diubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).⁴⁶

Berikut ini beberapa gambaran kegiatan BMT yang ada di Indonesia. Di Sumatera Selatan terdapat BMT Surya Barokah, BMT *Mu'awanah*, dan BMT Prima. BMT Surya Barokah merupakan Koperasi Syariah yang berkantor di Jalan Ki Merogan, No. 511, Kertapati, Palembang. Berdirinya BMT Surya Barokah ini membantu masyarakat Palembang khususnya pengusaha kecil dan mikro dengan memberikan suatu dana pinjaman atau pembiayaan modal yang sesuai dengan prinsip syariah dan terlepas dari praktik ribawi. Melihat kondisi riil masyarakat sekitar, khususnya di Kecamatan Kertapati dari sisi ekonomi masih banyak masyarakatnya kekurangan dan belum dapat hidup secara layak. Masih banyak rentenir, tidak adanya lembaga keuangan yang ada seperti bank dalam memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat bawah dan kondisi-kondisi lainnya yang serba tidak menguntungkan bagi masyarakat kecil. Padahal dari potensi yang dimiliki oleh mereka yang apabila dikelola dengan sistem kebersamaan, maka akan dapat meningkatkan ekonomi mereka.

Dalam hal ini, BMT Surya Barokah menawarkan solusi dengan menawarkan produk simpan pinjam dan jasa yang terdiri dari:

1. Produk tabungan seperti:
 - a. Tabungan Barokah (bersifat titipan, tanpa biaya administrasi);
 - b. Tabungan Aqiqah (bisa diambil sesuai kesepakatan menjelang aqiqah);
 - c. Tabungan Qurban (bisa diambil sesuai kesepakatan menjelang qurban);
 - d. Tabungan Sisabar (bisa diambil sesuai kesepakatan menjelang kenaikan kelas/kelulusan);

⁴⁶ <http://www.depkop.go.id/content/read/menkop-puspayogalangkah-perhimpunan-BMT-indonesia-selaras-dengan-reformasi-total-koperasi/>, diakses pada tanggal 22 Januari 2017.

- e. Tabungan Pra-nikah (bisa diambil sesuai kesepakatan menjelang pelaksanaan nikah);
- f. Deposito *Mudharabah* (tabungan berjangka minimal Rp 1.000.000,00 dengan bagi hasil ekv.1%)
2. Produk pembiayaan pada BMT Surya Barokah adalah sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan *Murabahah*;
 - b. Pembiayaan Swadaya Pinjaman Skala Modal Kecil (PSMK).
3. Produk Pelayanan Jasa pada BMT Surya Barokah adalah sebagai berikut:
 - a. Jasa Tiki (pengiriman dokumen dan barang);
 - b. Jasa pelayanan aqiqah (melayani pemesanan kambing mentah/masak gratis biaya potong dan antar); dan
 - c. Jasa PPOB (Pembayaran tagihan listrik, PDAM, dan telepon).

Pembiayaan modal BMT Surya Barokah memberikan pengaruh sebesar 44,8% terhadap peningkatan pendapatan pengusaha mikro, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 55,2%, hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan modal memberikan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan pengusaha mikro. Pembiayaan BMT Surya Barokah juga memberikan pengaruh sebesar 35,6% terhadap kesejahteraan pengusaha mikro, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 64,4%, hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan modal memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan pengusaha mikro.⁴⁷

BMT lainnya adalah BMT Mu'awanah yang beralamat di Jalan Silaberanti Plaju, Kampung Teladan Palembang, Sumatera Selatan. Dalam menjalankan usahanya, BMT Mu'awanah Palembang memiliki berbagai macam produk, yaitu produk penghimpunan dana, simpanan berjangka,

⁴⁷ Fajar Holis, *Pengaruh Pembiayaan Modal BMT Surya Barokah Palembang Terhadap Peningkatan Pendapatan Dan Kesejahteraan Pengusaha Mikro*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islan Negeri Raden Fatah, Palembang, hlm. 57.

dan produk penyaluran dana seperti pembiayaan *mudharabah* dan *qardhul hasan*. Dengan adanya BMT Mu'awanah, secara tidak langsung juga dapat mengurangi atau bahkan dapat menghilangkan sejumlah rentenir di wilayah Silaberanti Plaju. Beberapa peran BMT Mu'awanah dalam perekonomian masyarakat Silaberanti Plaju antara lain:

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang tidak syariah,
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil,
3. Melepaskan ketergantungan kepada rentenir, masyarakat yang masih tergantung pada rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera,
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi merata⁴⁸

Peran BMT Mu'awanah dalam menjauhkan dan melepaskan masyarakat dari rentenir, juga dilakukan oleh BMT KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Sejahtera yang merupakan salah satu BMT yang sangat potensial di Provinsi Sumatera Utara dalam memberdayakan masyarakat dan mengeliminasi peran rentenir dalam bidang permodalan bagi masyarakat desa. Dalam perjalanan sejarah BMT di Kecamatan Percut Sei Tuan, usaha-usaha pemberdayaan ekonomi umat berhadapan secara frontal dengan banyak hambatan dan tantangan. Tantangan paling sulit untuk dikalahkan BMT adalah para rentenir atau tukang kredit yang setiap saat beroperasi di tengah pemukiman penduduk, sementara gaya hidup konsumtif terus meningkat di kalangan masyarakat. Berdasarkan alasan tersebut para pengelola BMT KUBE Sejahtera selalu memperingatkan nasabahnya untuk menghindari

⁴⁸ Marlina Widiyanti, *Peran BMT Mu'awanah Palembang dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Miskin, Studi Kasus di BMT Mu'awanah Palembang*, dalam Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, dkk, *BMT Praktik dan Kasus*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 175.

peminjaman uang atau pembelian barang kepada tukang kredit, karena sangat merugikan, baik secara ekonomi maupun agama. Peringatan pengelola BMT tampaknya cukup efektif mempengaruhi para nasabah, baik anggota KUBE maupun nasabah lepas. Menurut pengakuan sejumlah informan (anggota KUBE binaan BMT ataupun nasabah lain), sejak mereka menjadi nasabah BMT KUBE Sejahtera II Bandar Setia, tidak lagi berurusan dengan para tukang kredit. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran nasabah BMT bahwa apa yang dikerjakan oleh tukang kredit hanyalah semata-mata bisnis ilegal yang bertujuan memperkaya diri pribadi, bukan suatu solusi pemberdayaan masyarakat. Strategi yang dijalankan oleh tukang kredit memang cukup licik, sehingga tidak dirasakan masyarakat tujuan-tujuan aktivitas mereka yang pada hakikatnya menghisap dan menghancurkan ekonomi masyarakat.⁴⁹

Lembaga-lembaga keuangan bukan bank yang konvensional menjamur dan bahkan rentenir-rentenir sifatnya pribadi dengan mengatasnamakan dirinya koperasi melakukan atau memberikan pinjaman modal kepada masyarakat dengan sistem bunga yang sangat tinggi yang dapat mempersulit masyarakat untuk melunasi hutangnya pada lembaga keuangan tersebut dengan jaminan yang ditentukan kedua belah pihak.⁵⁰

BMT Prima yang beralamat di Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah melayani pembiayaan kepada anggota, mengelola zakat, infaq, dan sedekah. Jumlah modal yang dimiliki sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 2.372.293.592,00. Hambatan yang dihadapi adalah banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan, namun belum

⁴⁹ Chuzaimah Batubara, *BMT Versus Rentenir Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Studi Kasus di Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang Sumatera Utara*, Jurnal Penelitian Medan Agama, 2010, hlm. 17-18.

⁵⁰ Atin Meriati Isnaini, *Kedudukan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank Dengan Sistem Syariah*, Jurnal Hukum JATISWARA, Fakultas Hukum Universitas Mataram, hlm. 179.

dapat terlayani dengan maksimal dikarenakan kurangnya modal BMT Prima yang hanya ditopang dari tabungan masyarakat dan belum mendapat tambahan modal dari pihak ketiga, seperti dari perbankan.⁵¹

Di Jawa Tengah, menurut Sakai sebagaimana dikutip Riwijanti. N. I. dan Asutay. M.⁵², berpendapat bahwa:

“Sakai argues that BMTs have developed financing services, despite the limited start-up capital, and are able to provide financial resources to microenterprises as an alternative to money lenders. New economic prospects are brighter for the poor community as BMT facilitates their business. Sakai also conducted a study over three consecutive years (2006, 2007, 2008) on how BMT services enhance microenterprises among women in Central Java; the study revealed that BMT contributes to improve women’s economic independence by providing them with access to financial services”

Sakai berpendapat bahwa BMT telah mengembangkan layanan pembiayaan, meskipun modal awal terbatas, namun mampu menyediakan sumber daya keuangan untuk usaha mikro sebagai alternatif pemberi pinjaman uang. Prospek ekonomi baru lebih cerah bagi masyarakat miskin, karena BMT memfasilitasi bisnis mereka. Sakai juga melakukan penelitian selama tiga tahun berturut-turut, yaitu tahun 2006, 2007, 2008, tentang peningkatan layanan BMT usaha mikro di kalangan perempuan di Jawa

⁵¹ Rapat Anggota Tahunan BMT Prima Tahun Buku 2016.

⁵² Riwijanti N I, Asutay M. *The Role Of Islamic Micro-Finance Institutions In Economic Development In Indonesia: A Comparative Analytical Empirical Study On Pre- And Post-Financing States*. In H A El- Karanshaw Et Al. (Eds.), *Access To Finance And Human Development – Essays On Zakah, Awqaf And Microfinance*. 2015. Doha, Qatar: Bloomsbury Qatar Foundation, page 58.

Tengah. Dalam penelitian diungkapkan bahwa BMT berkontribusi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi bagi perempuan dengan menyediakan mereka akses pelayanan keuangan.

Di Jawa Barat, BMT Berkah Madani Cimanggis adalah salah satu sampel keberhasilan BMT yang ditunjukkan dengan meningkatnya pembiayaan, pendanaan, dan investasi. Peningkatan pembiayaan akan dijelaskan di tabel sebagai berikut⁵³:

Tabel 2
Financing of BMT Berkah Madani Cimanggis
at Year 2007, 2008, and 2009

Type of Financing	2007	2008	2009	Trend	%
<i>Murabahah Product</i>	Rp 433.164.442	Rp 421.934.113	Rp 606.367.606	↑	43,71
<i>Mudharabah Product</i>	Rp 28.506.117	Rp 27.687.300	Rp 304.687.300	↑	1,00
<i>Ijarah Product</i>	Rp 69.658.686	Rp 82.729.634	Rp 124.456.717	↑	50,44
<i>Al-Qard Product</i>	Rp 11.841.778	Rp 10.630.000	Rp 6.358.500	↓	-40,18
Total	Rp 542.811.023	Rp 542.981.056	Rp 1.041.870.123	↑	91,88

Source: Annual Performance Report of BMT Berkah Madani Cimanggis 2009

⁵³ Muhamad Nadrattuzaman Hosen dan Lia Syukriyah Sa'roni, *Determinant Factors of the Successful of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences* August 2012, Vol. 1, No. 4, page. 37, available online at www.hrmar.com/journals.

Berdasarkan tabel Pembiayaan BMT Berkah Madani Cimanggis pada tahun 2007, 2008, dan 2009, dapat dikatakan bahwa pembiayaan BMT Berkah Madani Cimanggis berkembang dengan baik. Tren pembiayaan meningkat dalam berbagai jenis, kecuali *al-qardh*, karena murni pembiayaan *qardh* tanpa margin keuntungan. BMT adalah margin keuntungan yang diperlukan untuk bertahan hidup dalam bisnis BMT, sehingga *al-qardh* dapat berkurang.

Kegiatan BMT di masjid-masjid Yogyakarta, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasyim⁵⁴, bahwa:

“Several mosques surveyed in Yogyakarta have business units that have been developed and growing rapidly, such as the Mosque of Syuhada and Jogo Karyan Mosque. This mosque has a school (TK-SMP), Cooperative, BMT, Polyclinic even Lodging / Hotel. Business units run by the mosque should at least be in accordance with the role and function to improve people’s economy. Jamaah of the mosques and the surrounding community should be benefited from the existing business units. All business units must be professionally managed and should not be in conflict with sharia. Most of the mosque congregants (69%) have used existing business units in the mosque. The product of the mosque’s business unit that is most in demand by congregants is the medical or healthcare service. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) including

⁵⁴Hasim, *The Implementation Of Baitul Maal Management In Early Islam As The Alternative To Increasing People’s Economy: Case Study On The Management Of Mosque In Yogyakarta, Proceeding of 2nd International Conference of Arts Language And Culture* ISBN 978-602-50576-0-1, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 381.

products that interest community. This sharia financing unit is very helpful to the community, especially if there is a sudden funding needs. Through some easy, cheap and fair financing schemes, BMT is now a pilgrim destination for the development of venture capital. If properly managed, professional and trustworthy, BMT will be an economic power of the extraordinary people as in the time of Caliph Umar bin Khatab."

Di Yogyakarta, beberapa masjid yang disurvei memiliki unit bisnis yang telah berkembang pesat, seperti Masjid Syuhada dan Masjid Jogokariyan. Masjid ini memiliki sekolah (TK-SMP), Koperasi, BMT, Poliklinik bahkan Penginapan/Hotel. Unit bisnis yang dijalankan oleh masjid setidaknya harus sesuai dengan peran dan fungsi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Jamaah masjid dan masyarakat sekitar harus diuntungkan dari unit bisnis yang ada. Semua unit bisnis harus dikelola secara profesional dan tidak boleh bertentangan dengan syariah. Sebagian besar jamaah masjid (69%) telah menggunakan unit bisnis yang ada di masjid. Produk unit bisnis masjid yang paling diminati oleh umat adalah layanan medis atau perawatan kesehatan. BMT termasuk produk yang diminati masyarakat. Unit pembiayaan syariah ini sangat membantu masyarakat, terutama jika ada kebutuhan pendanaan mendadak. Melalui beberapa skema pembiayaan yang mudah, murah, dan adil, BMT sekarang menjadi tujuan untuk pengembangan modal ventura. Jika dikelola dengan baik, profesional dan dapat dipercaya, BMT akan menjadi kekuatan ekonomi orang-orang luar biasa seperti pada masa Khalifah Umar bin Khatab.

BMT juga bekerja sama dengan beberapa departemen dan berbagai pihak untuk melaksanakan program kerjanya, seperti:

1. Tahun 1996 BMT bekerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) dengan program yang bernama Program Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional yang melahirkan ratusan BMT di seluruh Indonesia.
2. Tahun 1997 bekerja sama dengan Departemen Koperasi dalam Pengembangan Pengembangan BMT Berbasis Pesantren.
3. Tahun 1998 PINBUK bekerja sama dengan Depnaker dalam Program Penanggulangan Pengangguran Terpadu dan melahirkan ribuan BMT di seluruh Indonesia.
4. Tahun 2001 bekerja sama dengan Departemen Kelautan dan Perikanan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan Lembaga Ekonomi Produktif Mikro Mitra Mina (LEPM3)
5. Tahun 2002 bekerja sama dengan Depnakertrans dalam Pengembangan model BMT Trans (Migrasi).
6. Tahun 2004 bekerja sama dengan Departemen Sosial dalam pengembangan model BMT Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dalam rangka Pemberdayaan fakir miskin di daerah eks kerusuhan dan sub urban.
7. Tahun 2005 bekerja sama dengan Departemen Sosial dalam pengembangan model BMT KUBE dalam rangka Adopsi Desa Miskin (ADEM) dan sub urban.
8. Tahun 2005 bekerja sama dengan PT. Kondur Petroleum dalam pengembangan Model BMT CSR (*Corporate Social Responsibility*).
9. Tahun 2006 bekerja sama dengan Kementerian Koperasi mengenai *Training Of Trainers* (TOT) koperasi syariah.
10. Tahun 2008 bekerja sama dengan Departemen Pertanian dan melahirkan puluhan ribu Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) dalam Pemberdayaan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP).

11. Tahun 2010 bekerja sama dengan Pemerintah Kota Padang dalam pengembangan model BMT berbasis kelurahan.

Dari uraian peran BMT tersebut di atas, sebagai lembaga keuangan alternatif, BMT dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, namun BMT didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. Status BMT ditentukan oleh jumlah aset yang dimiliki, maka BMT memiliki status hukum yang berbeda pula sesuai dengan tahapan jumlah aset tersebut, serta tunduk pada hukum yang beragam dan parsial sesuai dengan tahap status hukum. Status hukum BMT terbagi menjadi dua tahap, yaitu:

1. BMT yang belum memiliki badan hukum.

Pada mulanya, BMT yang belum memiliki badan hukum merupakan bagian dari dewan kemakmuran masjid. Secara historis BMT biasanya dimulai dari masjid atau keluarga besar yang membentuk suatu paguyuban yang lebih besar dari arisan. Ternyata konsep ini sangat disukai dan dianggap cocok bagi kebanyakan rakyat yang tidak punya akses kepada perbankan. Menurut Wibowo, sebagaimana dikutip Yusar Sugara, BMT adalah lembaga khas Indonesia, sehingga lembaga ini perlu diapresiasi sekaligus dilindungi sebagai produk asli Indonesia. Dalam hal kelembagaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah sebagai payung hukum BMT di Indonesia karena objek hukumnya jelas, adapun penyebutan BMT di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro tidak bisa memenuhi *legal standing* objek dari hukum karena BMT dalam interpretasi undang-undang tersebut hanyalah sebuah sebutan.⁵⁵

⁵⁵ Yusar Sagara, dkk, *Penguatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Baitul Maal Tanwil (BMT) Sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu (BUMRT)*, Sosio Didaktika: Social Science Education Journal, 3 (1), 2016, hlm. 82.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, BMT yang belum berbadan hukum pada umumnya menggunakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan mendapat surat keterangan operasional dari PINBUK. Pada awal pendirian BMT, aset yang dimiliki adalah Rp5.000.000,00-Rp20.000.000,00, biasanya lebih kecil dari Rp100.000.000,00.

2. BMT yang memiliki badan hukum.

BMT memiliki badan hukum yang beragam yaitu:

a. yayasan, seperti BMT Syuhada di bawah naungan Yayasan Masjid Syuhada berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.

b. koperasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

Badan hukum koperasi seperti Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang saat ini menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), jika BMT telah memiliki aset Rp100.000.000,00 atau lebih;

c. Perseroan Terbatas (PT.), berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Bila aset telah mencapai miliaran rupiah, maka badan hukum BMT adalah perseroan terbatas, seperti PT. Permodalan BMT Ventura, PT. Ventura Syariah, PT. Ventura Konvensional, dan PT. Halal Square.

Keharusan mengubah diri dari BMT yang merupakan salah satu lembaga keuangan mikro menjadi berbadan hukum koperasi atau PT., akan menimbulkan suatu konsekuensi yuridis yakni bahwa seluruh peraturan yang ada dalam BMT, baik tata cara pendirian, pengelolaan, dan pengawasan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan sesuai badan hukum tersebut. Seperti halnya transformasi BMT menjadi KJKS menimbulkan suatu konsekuensi yuridis yakni bahwa seluruh peraturan yang

ada dalam BMT, baik tata cara pendirian, pengelolaan, dan pengawasan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkoperasian. Hal ini bertujuan agar tercipta suatu kepastian hukum, padahal ada perbedaan berdasarkan pengoperasian lembaganya antara KJKS dengan BMT. Pengoperasian BMT menjalankan dua manajemen keuangan sekaligus, yakni *baitul maal* (meliputi pengumpulan dan penyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah) dan *baitut tamwil* (melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung), sedangkan pengoperasian KJKS hanya menjalankan jasa keuangan simpan pinjam yang menggunakan sistem syariah, tidak melakukan pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah. BMT juga memiliki memiliki tiga dimensi yaitu fungsi regulasi, fungsi permodalan, dan fungsi pemberdayaan, dimana fungsi pemberdayaan tidak ada pada fungsi KJKS.

Terhadap perbedaan pengoperasian antara BMT dan KJKS, maka pada tanggal 23 September 2015, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan Menteri ini mengubah status KJKS kepada KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) dengan menghapus Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Meski mengubah ketentuan sebelumnya akan tetapi dalam ketentuan Peraturan Menteri Nomor 16

/Per/M.KUKM/IX/2015 tersebut tetap mengatur ketentuan tentang Standar Operasional Manajemen (SOM) yang mengatur mengenai SOM kelembagaan, usaha, keuangan dan pengamanan aset dan piutang bagi koperasi syariah.⁵⁶ Perubahan selanjutnya, untuk efektivitas pelaksanaan pengembangan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi perlu dilakukan penyempurnaan, yaitu mengembangkan jaringan layanan elektronik bagi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan memanfaatkan teknologi informasi, maka pada tanggal 12 Januari 2018 diundangkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/Per/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Menurut keterangan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Braman Setyo Dawas, dasar perubahan KJKS menjadi KSPPS terlahir dari BMT yang merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia.⁵⁷

Dengan status hukum dan badan hukum yang beragam dari lembaga keuangan BMT, koperasi adalah badan hukum yang paling mendekati karakteristik BMT karena kesamaan asas dan idealisme kekeluargaan dan menyentuh umat, namun tidak semua manajemen dan dimensi BMT terpenuhi dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Seperti contoh BMT di eks Karesidenan Surakarta, secara keseluruhan BMT di eks

⁵⁶ Menyoal Regulasi Koperasi Syariah, <http://dpn-apsi.or.id/menyoal-regulasi-koperasi-syariah-dari-kjks-ke-kspps/> diakses pada tanggal 24 Januari 2017.

⁵⁷ Pembiayaan syariah, <http://www.pembiayaansyariahkukm.info/Materi/rilis.pdf> diakses pada tanggal 3 Februari 2017.

Karesidenan Surakarta berbadan hukum koperasi.⁵⁸ Koperasi dijadikan alternatif badan hukum BMT karena dari definisi dan unsur-unsur koperasi yang dikemukakan oleh Afzalur Rahman sebagaimana dikutip oleh Neni Sri Imaniyati, memiliki kesamaan unsur dengan BMT, unsur tersebut meliputi unsur ketetapan, unsur sosial, dan unsur ekonomi.

Unsur utama ketetapan lembaga koperasi pertamanya adalah lembaga ini merupakan organisasi sukarela dan dibentuk atas kepentingan anggotanya. Pada unsur sosial, koperasi adalah suatu usaha kolektif, tetapi usaha ini berdasarkan kepentingan personal. Unsur sosial berperan dalam tingkat sosial keanggotaannya dan prinsip demokrasi, kesamaan manajemen bersama, serta pelayanan mutual pada tubuh koperasi. Pada unsur ekonomi, koperasi mempunyai dua tujuan ekonomi, yaitu tuntutan anggota dan kepentingan koperasi itu sendiri.⁵⁹

Demi kepastian hukum keberadaan BMT sebagai subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum, dipandang perlu dilakukan penguatan hukum BMT dengan mengkaji BMT sebagai badan hukum, yaitu menggolongkan BMT ke dalam badan hukum perhimpunan/perkumpulan, serta membentuk perangkat hukumnya. BMT telah memenuhi syarat badan hukum, yaitu:

1. Adanya pemisahan harta kekayaan antara badan usaha dengan pemilik badan usaha,
2. Badan usaha mempunyai tujuan tertentu,
3. Badan usaha mempunyai kepentingan sendiri,

⁵⁸ Solikhah dkk, *Bentuk Badan Usaha Ideal Untuk Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Hukum Dalam Pengelolaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Berdasarkan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro di Eks Karesidenan Surakarta*, Jurnal Yustisia Edisi 93 September-Desember 2015, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015, hlm. 84.

⁵⁹ Neni Sri Imaniyati, *op. cit.*, hlm. 196-197.

4. Adanya organ yang jelas dalam badan usaha yang bersangkutan.⁶⁰

Pemilihan badan hukum perhimpunan/perkumpulan (*vereniging*) sebagai landasan penguatan hukum terhadap BMT adalah karena perhimpunan menurut E.Utrecht/Moh. Saleh Djidang, perhimpunan dibentuk dengan sengaja dan dengan sukarela oleh orang yang bermaksud memperkuat kedudukan ekonomi mereka (*baitut tamwil*), memelihara kebudayaan (ekonomi kerakyatan), dan mengurus soal-soal sosial (*baitul maal*), sesuai dengan BMT yang memiliki karakteristik ekonomi kerakyatan berlandaskan prinsip syariah.

Badan hukum perhimpunan BMT tersebut disesuaikan dengan karakteristik BMT yang meliputi manajemen keuangan *baitul maal* yaitu pengumpulan dan penyalurkan dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) dari masyarakat, dan *baitut tamwil* yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung yang berasaskan sistem ekonomi kerakyatan yang melaksanakan kegiatan manajemennya sesuai dengan prinsip Islam.

Mengenai perangkat hukum terhadap badan hukum yang telah dibentuk adalah diperlukan karena sebagaimana diketahui bahwa, kedudukan badan, perkumpulan, atau persekutuan dagang sebagai badan hukum harus ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, kebiasaan, atau yurisprudensi.⁶¹ Dasar hukum badan hukum di Indonesia saat ini adalah:

⁶⁰ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 32-33. Lihat juga R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 147.

⁶¹ Rr. Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, Yogyakarta: Andi, 2012, hlm. 31.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,
3. NBW (*Nieuw Burgerlijk Wetboek*) Belanda,
4. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas,
5. Undang-Undang tentang Perkoperasian,
6. Undang-Undang tentang Yayasan, dan lain sebagainya.⁶²

Konsep hukum keberadaan BMT adalah berdasarkan asas demokrasi ekonomi untuk melakukan kegiatan ekonomi syariah, asas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas keadilan. Pengaturan BMT dan lembaga keuangan syariah, masih dihadapkan pada berbagai kesulitan pengembangan hukum perdagangan di Indonesia. Kesulitan mengembangkan hukum perdagangan di Indonesia adalah dikarenakan belum adanya undang – undang atau hukum tertulis yang mengatur hal ihwal hukum perdata dan dagang sebagai soal yang mendasar seperti hukum yang mengatur perikatan atau kontrak atau bentuk usaha lain selain perseroan terbatas. Namun demikian banyak ketentuan-ketentuan hukum perdata dan dagang sebenarnya sudah berlaku dalam kenyataan hidup masyarakat walaupun tidak ada undang – undang atau hukum tertulis. Asas – asas hukum perdata seperti *pacta sunt servanda* (perjanjian yang diadakan harus ditaati) atau *bona fides* (itikad baik) dan asas – asas lain maupun konsep hukum perdata seperti asas kebebasan berkontrak sudah cukup dikenal dan dipergunakan. Demi kepastian hukum kesemuanya ini sebaiknya diberi bentuk hukum tertulis atau undang – undang. Hukum perikatan sudah mendesak sekali untuk diundangkan, bersama dengan bentuk bentuk usaha dagang (perusahaan dagang) selain perseroan terbatas, materi ini merupakan dasar atau tulang punggung bagi pengembangan hukum perdata dan dagang. Dan akan membawa pengaruh terhadap perkembangan BMT di

⁶² Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hlm. 21.

Indonesia karena pada dasarnya pengaturan tentang BMT harus sejalan dengan aturan perdata dan dagang secara umum.⁶³

Berdasarkan uraian sebelumnya, secara teori BMT tidak dapat diklasifikasikan pada bentuk badan hukum yang telah ada dan memerlukan perundang-undangan khusus yang mengatur BMT, maka penulis memandang perlu untuk dilakukan kajian tentang Figur Hukum *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan, yang akan penulis uraikan secara lengkap pada bab selanjutnya.

⁶³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep - konsep Hukum dalam Pembangunan Pusat Studi Wawasan Nusantara*, Hukum dan Pembangunan: Bandung, 2002. hlm. 193, dalam Neni Sri Imaniyati, Eksistensi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Sebagai lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, Dipublikasikan pada Jurnal Hukum Pro Justitia Tahun XXII No.4 Oktober 2004 halaman 71-84, ISSN:0215-7519 Dan pada Buku kapita Selekt Hukum Perdata (Editor Dr.H.Toto Tohir,S.H.,M.H.), Fakultas Hukum Unisba, 2004, hlm. 19.